



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSMILE (021) 3520351  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 17/KEP-SJ/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal dalam penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal.
- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setiap tahun.
- KEEMPAT : Biro Perencanaan mengoordinasikan monitoring dan evaluasi paruh waktu dan pelaporan lima tahunan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal pada masing-masing unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 17/KEP-SJ/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia (Presiden RI) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Renstra Setjen) KKP Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra KKP Tahun 2020-2024. Renstra Setjen KKP 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.

Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi di bawah Menteri, bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi KKP dalam

mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra Setjen KKP 2020-2024 disusun berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen KKP 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan.

### Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi Sekretariat Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh biro dan pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level satuan kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sekretariat Jenderal Tahun 2019 sebesar 108,88%, dihasilkan dari nilai kinerja perspektif *customer* sebesar 36,85%, perspektif internal *process* sebesar 36,44%, dan perspektif *learn and growth* sebesar 35,59%. Dari 18 (delapan belas) sasaran strategis, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang memiliki nilai dibawah 100%, yaitu terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima (Nilai Sasaran Strategis/NSS 97,70), dan terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Jenderal yang kompeten, professional, dan berintegritas (NSS 90,46). Secara rinci

capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 berdasarkan uraian capaian kinerja pada tabel berikut:

Tabel  
Capaian Kinerja Tahun 2015-2019 Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis		Uraian Indikator Kinerja		2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional, dan berintegritas	1	Indeks Profesionalitas (IP) ASN (indeks)	-	-	-	-	72,48
2	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	2	Persentase unit kerja KKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	60,92	51,29	81,92	91,14
3	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	70,51	78,74	78,74	78,95	BB (78,60)
		4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KKP (nilai)	80,76	84,59	82,45	81,64	A (82,04)
4	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (%)	-	-	-	-	94,62
		6	Opini atas Laporan Keuangan (LK) KKP (opini)	WTP	WTP	TMP	TMP	WTP
5	Terwujudnya kerja sama yang implementatif dan opini publik yang positif terhadap program dan kebijakan KKP	7	Persentase dokumen yang diterima/ ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%)	40	46	126,4	117,14	109,48
		8	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP (%)	-	-	-	-	0,2
6	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra KKP	9	Indeks pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra KKP (indeks)	-	-	-	3,8	4,16
7	Tersedianya kebijakan pembangunan lingkup Sekretariat Jenderal yang partisipatif	10	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)	6	7,67	8,11	8,2	8,27

Sasaran Strategis		Uraian Indikator Kinerja		2015	2016	2017	2018	2019
8	Terselenggaranya penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP berbasis kompetensi	11	Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP (%)	100	94	90	83	76,02
9	Tersedianya data statistik informasi Kelautan dan Perikanan (KP) yang valid, handal dan mudah diakses	12	Tingkat kepatuhan pengelolaan data (%)	-	-	-	47,25	65,89
10	Terselenggaranya RB KKP yang optimal	13	Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai <i>road map</i> RB per tahun (%)	90	97,92	90,95	97,89	92,59
		14	Nilai Kepuasan pelayanan kerumahtanggaan (nilai)	-	-	75,16	81,05	A (82,44)
		15	Persentase paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diusulkan (%)	-	-	-	72	99
11	Terwujudnya LK yang akuntabel	16	Persentase kesesuaian penyusunan dan ketepatan waktu penyampaian LK (%)	100	100	80	100	80
12	Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	17	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui media dan lembaga <i>stakeholder</i> lainnya (%)	115	95,5	97,32	96,87	176,88
13	Terintegrasinya sistem informasi KKP	18	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	-	-	-	3,38 (Baik)	3,57 (Sangat Baik)
14	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama	19	Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati (dokumen)	40	77	93	133	112

Sasaran Strategis		Uraian Indikator Kinerja		2015	2016	2017	2018	2019
	bidang kelautan dan perikanan							
15	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal yang kompeten, profesional, dan berintegritas	20	IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)	-	-	-	-	69,54
16	Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Jenderal yang handal dan mudah diakses	21	Persentase unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	51,11	54,81	88,27	96,78
17	Terwujudnya birokrasi Sekretariat Jenderal yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	22	Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal (nilai)	82,10	86,24	87,10	89,78	A (98,77)
		23	Nilai AKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	-	86,24	87,10	84,82	83,35
		24	Level Maturitas SPI Sekretariat Jenderal (level)	-	-	2	3	3
		25	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	-	-	-	-	0
		26	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	-	-	-	-	82
18	Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Jenderal secara efisien dan akuntabel	27	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat Jenderal (%)	-	-	-	-	93,58
		28	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal TA.2018 (%)	-	-	-	0,62	0,01

Selama tahun 2015-2019, Sekretariat Jenderal telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) KKP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dengan diterapkannya manajemen kinerja di KKP berbasis BSC, sejak tahun 2013 KKP mendapatkan penilaian A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) untuk pelaksanaan SAKIP dan capaian yang sangat baik ini telah mampu dipertahankan oleh KKP sampai dengan tahun 2018, bahkan KKP merupakan satu-satunya kementerian teknis yang mendapatkan predikat A.

Melalui implementasi SAKIP, paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan, tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian anggaran juga dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas. Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan karena tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar, bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran. Selain memberikan penghargaan atas implementasi SAKIP, Kementerian PAN dan RB juga memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap instansi pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

- b. Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Anugerah Parahita Ekapraya berarti suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya

dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah. Tiga Kategori Penerima APE yaitu tingkat Pratama (pemula), tingkat Madya (pengembang), dan tingkat Utama (peletakan dasar dan keberlanjutan). Sejak dilakukan penilaian setiap tahun oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), untuk pertama kalinya KKP mendapatkan APE pada tahun 2013 memperoleh predikat tingkat Pratama dari Presiden RI yang diberikan pada puncak peringatan Hari Ibu Tahun 2013, yang kemudian predikat tersebut berhasil ditingkatkan menjadi tingkat Madya pada tahun 2014 dan menjadi tingkat Utama pada tahun 2016 dan pada tahun 2019, KKP penghargaan APE untuk Kategori Mentor yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2018 di Istana Wakil Presiden.

- c. *Subroto Award 2018* kategori Gedung Hemat Energi dan Kategori Manajemen Energi

Penghargaan Subroto adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada para *stakeholder* yang memiliki prestasi luar biasa dalam memajukan sektor ESDM. Tahun 2018 merupakan tahun kedua penyelenggaraan Penghargaan Subroto.

Penghargaan Subroto terdiri dari enam bidang penghargaan, yang terdiri dari Wartawan Energi, Keselamatan Ketenagalistrikan, Efisiensi Energi, Keselamatan Minyak dan Gas Bumi, Pengelolaan, Keselamatan, Lingkungan dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, serta bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Panas Bumi. Gedung Mina Bahari IV KKP meraih predikat pemenang I untuk kategori Bangunan Gedung Hemat Energi subkategori Gedung Baru. Menteri ESDM didampingi Wakil Menteri ESDM menganugerahkan Penghargaan Subroto 2018 kepada para *stakeholder* yang turut berperan aktif membangun sektor energi dan mineral pada tanggal 28 September 2018.

- d. *36<sup>th</sup> Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Ministers on Energy Award 2018*

KKP menyabet penghargaan dalam ajang bergengsi ASEAN *Energy Awards 2018*. Penghargaan tersebut adalah *1st Runner-Up* untuk kategori *Green Large Building* bagi Gedung Mirna Bahari IV. Penghargaan internasional ini diberikan pada rangkaian pelaksanaan

36<sup>th</sup> ASEAN *Minister on Energy Meeting* (AMEM) di, Singapura pada hari Selasa, 29 Oktober 2018. ASEAN *Energy Awards* secara rutin diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2000. Anugerah ini bertujuan untuk memberi apresiasi terhadap *best practices* dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pemanfaatan dan pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Proses seleksi dan penentuan pemenang sangat kompetitif dari ratusan kandidat yang diusulkan seluruh negara anggota ASEAN. Prestasi dalam ajang bergengsi ini menunjukkan bahwa KKP memenuhi standar lingkungan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kegiatan perkantoran yang ramah lingkungan. Selain itu, prestasi ini juga merefleksikan bahwa penggiat energi terbarukan terus melakukan berbagai inovasi dan bahwa instansi-instansi besar untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan energinya secara berkelanjutan.

e. Kearsipan Kementerian/Lembaga dari ANRI

Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia menyerahkan secara langsung hasil laporan pengawasan kearsipan tahun 2018 kepada 34 (tiga puluh empat) Kementerian/Lembaga (K/L) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pusat Akreditasi Kearsipan di Jakarta. Diharapkan melalui kegiatan pengawasan di bidang kearsipan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 di bidang kearsipan karena ANRI sebagai Lembaga pembina di bidang kearsipan mengapresiasi dan memberikan perhatian kepada masing-masing K/L terhadap pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah di bidang kearsipan. Pada kesempatan yang sama juga diumumkan hasil laporan pengawasan kearsipan terhadap KKP yaitu berhasil meraih peringkat ke-7 atau masuk kelompok 10 terbaik. Dengan diumumkankannya hasil laporan pengawasan kearsipan terhadap 34 K/L tersebut di harapkan dapat menjadi contoh bagi KKP terhadap peningkatan kinerja pengelolaan arsip pada setiap kegiatan administrasi pemerintahan dan bisa menjadi bukti akuntabilitas kinerja suatu K/L dalam pengelolaan arsip pemerintah agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud *good government* yang bersih dan transparan dalam setiap kegiatan administrasi pemerintah. Beberapa aspek yang diaudit di bidang kearsipan meliputi kebijakan kearsipan

program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, SDM kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan.

- f. Penghargaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk Manajemen Talenta dan Seleksi Terbuka

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan kepatuhan instansi pemerintah dalam kualitas tata kelola seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan inovasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, KASN memberikan Anugerah KASN 2018 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, tanggal 23 Oktober 2018. Untuk memastikan pemberian Anugerah KASN 2018 berjalan secara obyektif, profesional, dan independen maka KASN bekerja sama dengan pihak eksternal untuk membentuk Tim Panel. Unsur eksternal merepresentasikan ketokohan, kredibilitas, kontribusi, dan perannya dalam mewujudkan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik sesuai bidang keahlian dan profesinya. Terdapat 2 (dua) Kategori Anugerah KASN 2018 yaitu kategori utama dengan tema kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka pengisian JPT dan kategori khusus yaitu inovasi dan promosi penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. KKP berhasil menjadi penerima Anugerah KASN 2018 kategori utama. Melalui penghargaan ini diharapkan agar kinerja dan tata kelola manajemen ASN di KKP dapat menjadi lebih baik.

- g. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diberikan oleh Komisi Informasi Pusat

Penghargaan peringkat 5 KIP dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Kategori Badan Publik Kementerian, 21 Desember 2017. Predikat kepatuhan standar layanan publik KKP berada pada Zona Hijau dengan Nilai 91,13 dari Ombudsman, 5 Desember 2017.

- h. Anugerah Media Humas 2018 Kategori Medsos Tingkat Kementerian/Lembaga UMN/PTN

KKP mendapatkan penghargaan terbaik pertama kategori Media Sosial dalam Anugerah Media Humas 2018 (AMH 2018) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada hari Selasa, 4 Desember 2018. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kemenkominfo dengan harapan kinerja kehumasan instansi pemerintah semakin membaik.

Secara administratif Sekretariat Jenderal juga membina Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dengan komoditas kelautan dan perikanan dimana selain mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan nonbank sejak November 2017 juga mendapatkan pembiayaan dari dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU). Kinerja pengelolaan dana bergulir LPMUKP tahun 2019 cenderung positif. Sampai dengan tahun 2019, jumlah persetujuan pinjaman melalui dana bergulir bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp.409,38 miliar dan tersalurkan kepada 5 (lima) kategori sektor usaha bidang kelautan dan perikanan yaitu penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha garam rakyat, dan usaha masyarakat pesisir lainnya (kedai pesisir, wisata bahari). Dana bergulir yang disalurkan melalui LPMUKP tersebut telah disalurkan di 34 (tiga puluh empat) provinsi yang mencakup 199 (seratus sembilan puluh sembilan) kabupaten/kota. Lima kabupaten/kota dengan tingkat penyaluran terbesar yaitu di Lombok Tengah, Indramayu, Cilacap, Tarakan, dan Bima. Jumlah pemanfaat dana bergulir LPMUKP sampai dengan tahun 2019 mencapai 13.037 orang.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal antara lain:

- a. komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. SDM baik struktural maupun fungsional yang handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- c. sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai;
- d. peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan di KKP;
- e. sistem kerja berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja;

- f. kualitas Laporan Keuangan (LK) yang handal dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- g. perencanaan program, anggaran, dan pengelolaan kinerja yang baik dan berkualitas;
- h. pelaksanaan RB dalam peningkatan Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan akuntabel; dan
- i. informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

## 2. Permasalahan

Untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat Jenderal masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian di tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- a. belum seluruh pegawai dapat mengikuti program peningkatan kapasitas melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan dalam memenuhi nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) serta melengkapi ketentuan manajemen talenta pengembangan SDM aparatur;
- b. belum seluruh pegawai mendapatkan luasan ruang kerja yang ideal karena keterbatasan pemilikan gedung perkantoran;
- c. masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis;
- d. pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan prasarana SDM untuk mencapai indeks SPBE; dan
- e. pengumpulan dan pengolahan data statistik masih menghadapi tantangan akan ketersediaan dan kinerja para penyuluh/enumerator serta penyediaan sistem aplikasi yang handal.

## C. Lingkungan Strategis

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan amanat kepada setiap K/L untuk melakukan pelaksanaan RB di Lingkungan KKP yang meliputi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan yaitu program

manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pelaksanaan RB di lingkungan KKP akan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2020-2024 Sekretariat Jenderal menetapkan visi, yaitu “Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Sekretariat Jenderal sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan RB dan dukungan manajemen di lingkungan KKP.

#### B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah:

1. peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen; dan
2. penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

#### C. Tujuan

Tujuan beserta indikatornya dalam rangka menjabarkan dan mewujudkan misi Sekretariat Jenderal KKP yaitu:

1. meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator indeks sistem merit, indeks pengelolaan keuangan, indeks pengelolaan aset, indeks perencanaan, indeks kearsipan, nilai SPBE KKP, persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP, rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan; dan
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator nilai kinerja RB KKP, nilai SAKIP KKP, dan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal.

#### D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Jenderal sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sasaran strategis adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal” dengan indikator kinerja:

1. nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai);

2. nilai SAKIP KKP (nilai);
3. nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai);
4. nilai SPBE KKP (nilai);
5. opini BPK atas LK KKP (Opini);
6. batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal (%);
7. level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal (level);
8. indeks kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KKP (indeks);
9. nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai);
10. indeks sistem merit KKP (indeks);
11. IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal (indeks);
12. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit);
13. persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP (%);
14. rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%);
15. unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit);
16. unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
17. rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal (%);
18. indeks pengelolaan *asset* KKP (indeks);
19. indeks pengelolaan keuangan KKP (indeks);
20. indeks perencanaan KKP (indeks);
21. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (nilai);
22. nilai kinerja anggaran lingkup Sekretariat Jenderal (nilai);
23. persentase pencapaian target PNBPN BLU LPMUKP (%); dan
24. persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%).

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;

2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan 5 (lima) arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, media sosial, dan transformasi digital.

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Berdasarkan peran Sekretariat Jenderal yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi KKP Tahun 2020-2024 terutama yang terkait dengan Sekretariat Jenderal yaitu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan layanan dukungan manajemen internal KKP melalui:
  - a. mewujudkan manajemen perubahan dalam budaya organisasi;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik;
  - c. memfasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan dan penyederhanaan peraturan;
  - d. mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran;

- e. meningkatkan penataan tata laksana pelaksanaan tugas berbasis elektronik melalui penerapan SPBE;
  - f. mewujudkan ASN KKP yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi melalui penerapan merit sistem;
  - g. meningkatkan pelayanan umum internal KKP; dan
  - h. meningkatkan layanan barang dan jasa KKP.
2. meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi melalui:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja;
  - b. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
  - c. menyediakan data statistik dan sistem informasi yang handal;
  - d. membangun manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses;
  - e. meningkatkan kerja sama internasional;
  - f. meningkatkan kerja sama antarlembaga dan lintas sektor;
  - g. penguatan perencanaan dan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan dengan target program kegiatan KKP telah responsif gender; dan
  - h. meningkatkan strategi transformasi digital KKP, yang terdiri dari pelaksanaan Satu Data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagipakaikan, memanfaatkan analisis dari *big data*, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi (SDM TIK), dan meningkatkan literasi digital masyarakat kelautan dan perikanan.
3. fasilitasi percepatan penyaluran dana kelolaan BLU LPMUKP melalui:
- a. pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan; dan
  - b. meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana bergulir melalui modernisasi BLU.

### C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi KKP dan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KKP. Penyusunan peraturan

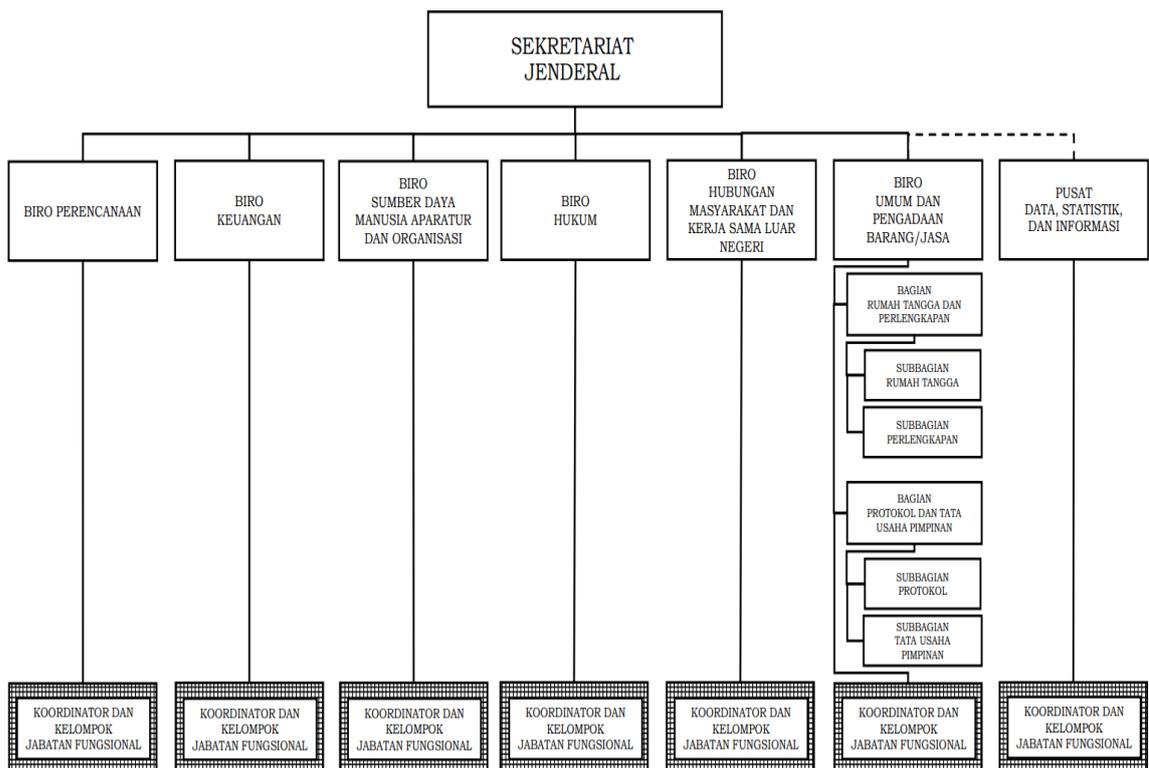
perundang-undangan di KKP dilaksanakan berdasarkan program penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Secara rinci rencana kerangka regulasi Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

#### D. Kerangka Kelembagaan

Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, yaitu Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan LPMUKP.

#### Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi kegiatan KKP;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KKP;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KKP;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dan fungsi unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan kebijakan umum dan strategis serta perencanaan kawasan terpadu di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi rencana, program, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta analisis, formulasi, dan perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan dana transfer di bidang kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi, serta bahan pimpinan;
- d. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi

kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

## 2. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja;
- b. koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. koordinasi dan pengelolaan badan layanan umum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan tata laksana dan transformasi keuangan serta kepatuhan pejabat perbendaharaan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta penyelesaian kerugian negara;
- f. koordinasi dan pengelolaan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

## 3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, serta koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, manajemen talenta, monitoring dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- b. koordinasi, alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;
- c. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
- d. koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai;

- e. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- f. koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi, dan tata laksana;
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

#### 4. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, serta monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, pengawasan internal, perikanan tangkap, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, serta monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan budidaya, penguatan data saing produk kelautan dan perikanan, serta karantina ikan dan pengendalian mutu;
- c. koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan, penyelesaian perkara hukum, dan diseminasi hukum;
- d. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perjanjian dan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

#### 5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

6. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, dan urusan angkutan pegawai, serta keamanan kantor pusat;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli, serta persandian;
- c. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
- d. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- e. koordinasi dan pengelolaan perlengkapan serta layanan perkantoran;
- f. koordinasi dan pengelolaan layanan dan dukungan layanan pengadaan barang/jasa, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

7. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Pusat Data, Statistik, dan Informasi melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta layanan perizinan terpadu Kementerian di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
  - b. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
  - c. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
  - d. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi;
  - e. penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi layanan perizinan terpadu Kementerian di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.
8. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Selain 6 (enam) biro dan 1 (satu) pusat, Sekretariat Jenderal juga secara administrasi membawahkan LPMUKP yang ditetapkan sebagai Satker Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 710/KMK.05/2016. Sejalan dengan hal tersebut, pada APBN 2017, LPMUKP mendapatkan alokasi investasi pemerintah dalam bentuk dana kelolaan BLU.

Menindaklanjuti penetapan LPMUKP sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (OTK LPMUKP). Penetapan OTK LPMUKP ini dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian PAN dan RB.

Tugas utama LPMUKP yaitu melakukan pengelolaan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan

(UMKM-KP). Pelayanan yang dilakukan oleh LPMUKP diantaranya penggunaan dana bergulir melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM-KP), usaha mikro kecil menengah, bank/lembaga keuangan bukan bank, langsung pelaku usaha KP, dan layanan pendampingan LPMUKP.

Dalam rangka pelaksanaan RB, Sekretariat Jenderal akan terus melakukan penyempurnaan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Penataan organisasi ini sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Penataan kelembagaan Sekretariat Jenderal akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang.

**BAB IV**  
**INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Target Kinerja**

Target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal	1	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34
		2	Nilai SAKIP KKP (nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)
		3	Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75
		4	Nilai SPBE KKP (nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		5	Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		7	Level maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3
		8	Indeks kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) KKP (indeks)	7	9	9	9	9
		9	Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai)	83	83,5	84	84,5	85
		10	Indeks sistem merit KKP (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85
		11	IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)	72	73	74	75	76
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	1	1	2	2	2
		13	Persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		14	Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%)	<15	<14	<13	<12	<11
		15	Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
		16	Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		17	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	60	65	70	75	80
		18	Indeks pengelolaan aset KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		19	Indeks pengelolaan keuangan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		20	Indeks perencanaan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (nilai)	88	89	89	90	90
		22	Nilai kinerja anggaran lingkup Sekretariat Jenderal (nilai)	85	86	87	88	89
		2	PNBP BLU sektor KP meningkat	23	Persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP (%)	95	95	96
24	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%)			95	96	97	98	100

Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di

KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Sekretariat Jenderal.

## B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal dan sasaran strategis yang telah ditetapkan memerlukan dukungan sumber daya keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kerangka indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp2,5 triliun yang digunakan untuk pengelolaan perencanaan, kinerja dan kerja sama antarlembaga, pengelolaan keuangan KKP, pengelolaan SDM aparatur, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan organisasi, pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, pengelolaan pengadministrasi dan pengadaan barang jasa, serta pengelolaan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Disamping itu terdapat *baseline* alokasi anggaran penggunaan PNBPN BLU-LPMUKP sebesar Rp 369,6 miliar tahun 2020-2024.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global *Covid-19* yang terjadi sejak awal tahun 2020.

## BAB V PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 disusun dan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan bagi rencana kerja tahunan di lingkup Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kerja keras dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.

KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							<b>446,5</b>	<b>475,2</b>	<b>499,5</b>	<b>524,9</b>	<b>551,8</b>	<b>2.497,9</b>
	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan KKP dan Sekretariat Jenderal</b>											
	1. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34						
	2. Nilai SAKIP KKP (nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)						
	3. Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	4. Nilai SPBE KKP (nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4						
	5. Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	6. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	7. Level Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3						
	8. Indeks kematangan UKPBJ KKP (indeks)	7	9	9	9	9						
	9. Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai)	83	83,5	84	84,5	85						
	10. Indeks sistem merit KKP (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85						
	11. IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)	72	73	74	75	76						
	12. Unit Kerja Berpredikat Menuju	1	1	2	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)											
	13. Persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100						
	14. Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%)	<15	<14	<13	<12	<11						
	15. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1						
	16. Persentase unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	17. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	60	65	70	75	80						
	18. Indeks pengelolaan asset KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	19. Indeks pengelolaan keuangan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	20. Indeks perencanaan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	21. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (Nilai)	88	89	89	90	90						
	22. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal (nilai)	85	86	87	88	89						
<b>Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP</b>							<b>15,5</b>	<b>17,5</b>	<b>20,5</b>	<b>23,5</b>	<b>26,5</b>	<b>103,5</b>
	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hukum dan Organisasi KKP</b>											
	a. Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hukum dan Organisasi (nilai)	9,94	10,08	10,22	10,36	10,50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Persentase capaian pelaksanaan <i>road map</i> RB KKP (%)	100	100	100	100	100						
	c. Persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100						
	d. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan (%)	100	100	100	100	100						
	e. Persentase masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100						
	f. Nilai rekonsiliasi kinerja Biro Hukum dan Organisasi (%)	90	91	92	93	94						
	g. IP ASN lingkup Biro Hukum dan Organisasi (indeks)	72	73	74	75	76						
	h. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Hukum dan Organisasi (%)	100	100	100	100	100						
	i. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Hukum dan Organisasi (%)	82	84	86	88	90						
	j. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Hukum dan Organisasi (%)	60	65	70	75	80						
	k. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Hukum dan Organisasi (nilai)	88	89	89	90	90						
	l. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Hukum dan Organisasi (nilai)	85	86	87	88	89						
	<b>Layanan Hukum (layanan)</b>						<b>12,4</b>	<b>13,6</b>	<b>15,4</b>	<b>16,8</b>	<b>18,2</b>	
	a. Peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing	15	18	21	24	27						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	produk kelautan dan perikanan, badan riset sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tersusun (peraturan)											
	b. Peraturan perundang-undangan bidang kesekretariatan, pengawasan internal, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang tersusun (peraturan)	20	23	26	29	32						
	c. Penanganan masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan (dokumen)	35	38	40	41	42						
	<b>Layanan Manajemen Organisasi (layanan)</b>						<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	
	Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan KKP	11	11	11	11	11						
	<b>Layanan Reformasi Birokrasi (layanan)</b>						<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	
	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB di lingkungan KKP	4	4	4	4	4						
<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur</b>							<b>14,8</b>	<b>16,8</b>	<b>19,8</b>	<b>22,8</b>	<b>25,8</b>	<b>100</b>
	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Sumber Daya Manusia Aparatur</b>											
	a. Komponen nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) (nilai)	7,81	7,92	8,03	8,14	8,25						
	b. Indeks sistem merit (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85						
	c. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34						
	d. IP ASN KKP	72	73	74	75	76						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	e. Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan Perikanan tingkat Nasional (kategori)	4	4	4	4	44						
	f. Nilai rekonsiliasi kinerja Biro SDMA (%)	90	91	92	93	94						
	g. IP ASN lingkup Biro SDMA (indeks)	72	73	74	75	76						
	h. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro SDMA (%)	100	100	100	100	100						
	i. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro SDMA (%)	82	84	86	88	90						
	j. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro SDMA (%)	60	65	70	75	80						
	k. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro SDMA (nilai)	88	89	89	90	90						
	l. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro SDMA (nilai)	85	86	87	88	89						
	<b>Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (layanan)</b>						<b>14,80</b>	<b>16,80</b>	<b>19,80</b>	<b>22,80</b>	<b>25,80</b>	
	a. Layanan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai (dokumen)	12	12	12	12	12						
	b. Layanan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian pensiun, dan mutasi (dokumen)	10	10	10	10	10						
	c. Layanan pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan jabatan fungsional (dokumen)	5	5	5	5	5						
	d. Layanan manajemen kinerja individu, informasi, dan ketatausahaan (dokumen)	18	18	18	18	18						
<b>Pengelolaan Keuangan KKP</b>							<b>21</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>131,00</b>

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Keuangan</b>											
	a. Komponen nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan (nilai)	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75						
	b. Indeks pengelolaan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Indeks pengelolaan aset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	d. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal	<1	<1	<1	<1	<1						
	e. Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	100	100	100	100	100						
	f. Nilai rekonsiliasi kinerja Biro Keuangan (%)	90	91	92	93	94						
	g. IP ASN lingkup Biro Keuangan (indeks)	72	73	74	75	76						
	h. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Keuangan (%)	100	100	100	100	100						
	i. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Keuangan (%)	82	84	86	88	90						
	j. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan (%)	60	65	70	75	80						
	k. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Keuangan (Nilai)	88	89	89	90	90						
	l. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Keuangan (Nilai)	85	86	87	88	89						
	<b>Layanan Manajemen Keuangan (layanan)</b>						<b>21</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	
	a. Tingkat kepatuhan terhadap SPI (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Tingkat ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintah (%)	100	100	100	100	100						
	c. Kecukupan pengungkapan dalam LK KKP (%)	100	100	100	100	100						
	d. Kecukupan informasi pelaksanaan anggaran KKP (%)	100	100	100	100	100						
<b>Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga</b>							<b>48,3</b>	<b>50,3</b>	<b>53,3</b>	<b>56,3</b>	<b>59,3</b>	<b>267,50</b>
	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Perencanaan</b>											
	a. Komponen nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan (nilai)	13,67	13,86	14,05	14,25	14,44						
	b. Indeks perencanaan (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Nilai SAKIP KKP (nilai)	82,04	82,5	83	83,5	84						
	d. Nilai rekonsiliasi kinerja Biro Perencanaan (%)	90	91	92	93	94						
	e. IP ASN lingkup Biro Perencanaan (indeks)	72	73	74	75	76						
	f. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan (%)	100	100	100	100	100						
	g. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Perencanaan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Perencanaan (nilai)	88	89	89	90	90						
	j. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perencanaan (nilai)											
	<b>Layanan Perencanaan (layanan)</b>						<b>48,3</b>	<b>50,3</b>	<b>53,3</b>	<b>56,3</b>	<b>59,3</b>	
	Terlaksananya pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerja sama antarlembaga (%)	100	100	100	100	100						
<b>Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa</b>							<b>252,6</b>	<b>269,3</b>	<b>275,6</b>	<b>283</b>	<b>291,9</b>	<b>1372,40</b>
	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa</b>											
	a. Komponen nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	1,42	1,44	1,46	1,48	1,5						
	b. Indeks kematangan UKPBJ (indeks)	7	9	9	9	9						
	c. Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (Nilai)	83	83,5	84	84,5	85						
	d. Persentase paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diusulkan (%)	95	96	97	98	99						
	e. Persentase terfasilitasinya layanan pimpinan (%)	90	91	92	93	94						
	f. Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan kantor pusat (%)	80	80,5	81	81,5	82						
	g. Penerapan inovasi pelayanan publik	1	1	0	0	0						
	h. Nilai rekonsiliasi kinerja Biro Umum dan PBJ (%)	90	91	92	93	94						
	i. IP ASN lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	72	73	74	75	76						
	j. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100	100						
	k. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	terstandar lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)											
	l. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	60	65	70	75	80						
	m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	88	89	89	90	90						
	n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	85	86	87	88	89						
	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)</b>						<b>19,60</b>	<b>24,60</b>	<b>25,60</b>	<b>27,10</b>	<b>29,10</b>	
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100	100						
	<b>Layanan Umum (layanan)</b>						<b>42,90</b>	<b>47,90</b>	<b>48,90</b>	<b>50,40</b>	<b>52,40</b>	
	a. Persentase pencapaian standar pelayanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (%)	100	100	100	100	100						
	b. Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP dan ketatausahaan biro sesuai SOP (%)	86	87	88	89	90						
	c. Persentase pencapaian standar pelayanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	d. Persentase pencapaian standar pemenuhan dukungan layanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	<b>Layanan Perkantoran (layanan)</b>						<b>190,10</b>	<b>196,80</b>	<b>201,10</b>	<b>205,50</b>	<b>210,40</b>	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, dan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Jenderal (bulan)	12	12	12	12	12						
<b>Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri</b>							<b>40,3</b>	<b>42,3</b>	<b>45,3</b>	<b>48,3</b>	<b>51,3</b>	<b>227,5</b>
	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri</b>											
	a. Komponen nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75						
	b. Nilai kinerja RB Sekretariat Jenderal program manajemen perubahan (nilai)	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6						
	c. Nilai keterbukaan informasi publik (nilai)	81	81	82	82	82						
	d. Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%)	90%	90%	90%	90%	90%						
	e. Persentase tindaklanjut atas hasil evaluasi pelayanan keprotokolanan acara dan perjalanan Menteri (%)	100	100	100	100	100						
	f. Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan	>85%	>86%	>87%	>88%	>89%						
	g. Nilai rekonsiliasi kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	90	91	92	93	94						
	h. IP ASN Lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (indeks)	72	73	74	75	76						
	i. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Humas dan Kerja Sama	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Luar Negeri (%)											
	j. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	82	84	86	88	90						
	k. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	60	65	70	75	80						
	l. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (Nilai)	88	89	89	90	90						
	m. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (Nilai)	85	86	87	88	89						
	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi (layanan)</b>						<b>14,3</b>	<b>14,8</b>	<b>15,8</b>	<b>16,8</b>	<b>17,8</b>	
	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP (%)	<15	<14	<13	<12	<11						
	<b>Layanan Protokoler (layanan)</b>						<b>18,5</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	
	Terselenggaranya pelayanan kepada pimpinan (layanan)	1	1	1	1	1						
	<b>Layanan Kerjasama Internasional (layanan)</b>						<b>7,5</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>	
	a. Persentase dokumen kerja sama internasional yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%)	90	90	90	90	90						
	b. Kerja sama selatan-selatan dan tringular bidang kelautan dan perikanan (paket)	2	2	2	2	2						
<b>Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP</b>							<b>54,0</b>	<b>56,0</b>	<b>59,0</b>	<b>62,0</b>	<b>65,0</b>	<b>296,0</b>

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)// SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi</b>											
	a. Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Pusat Data, Statistik, dan Informasi (nilai)	4,44	4,5	4,56	4,63	4,69						
	b. Nilai Mandiri SPBE KKP (nilai)	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2						
	c. Nilai Minimal yang dipersyaratkan ntuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	75	79	82	83	85						
	d. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (%)	75	80	85	90	90						
	e. Indeks Kepuasan Pengguna terhadap layanan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan (Nilai)	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3						
	f. Nilai Mandiri iIndeks Keamanan Informasi berbasis IT (nilai)	300	305	310	315	320						
	g. Nilai Mutu Pelayanan PTSP (%)	76	79	82	83	85						
	h. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi (%)	90	91	92	93	94						
	i. IP ASN Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (indeks)	72	73	74	75	76						
	j. Persentase penyelesaian temuan BPK ligkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (%)	100	100	100	100	100						
	k. Unit Kerja yang Menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (%)	82	84	86	88	90						
	l. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi (%)	60	65	70	75	80						



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan</b>							<b>69,1</b>	<b>71,1</b>	<b>73,7</b>	<b>76,5</b>	<b>79,2</b>	<b>369,6</b>
	<b>Layanan pengelolaan penyaluran modal usaha (layanan)</b>						<b>69,1</b>	<b>71,1</b>	<b>73,7</b>	<b>76,5</b>	<b>79,2</b>	
	a. Tersedianya layanan penyaluran modal usaha KP (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Realisasi UMKM kelautan dan perikanan penerima modal usaha (KUKP)	35.985	9.820	9.264	8.740	8.245						
	c. Rasio piutang bermasalah terhadap <i>outstanding</i> dana bergulir (%)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5						

KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020-2024

No.	Kebutuhan Regulasi/Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan	Mandat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biro Perencanaan	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun

No.	Kebutuhan Regulasi/Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
2.	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	Mandat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan	Biro Perencanaan	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
3.	Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024	Mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan	Tahun 2020
4.	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja) Tahun 2021	Mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	Biro Perencanaan	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
5.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMENKP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan KKP	Penyesuaian hari dan jam kerja di Lingkungan KKP berdasarkan perkembangan terbaru	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Unit kerja eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
6.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMENKP/2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan KKP	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
7.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
8.	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mandat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di lingkungan KKP	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Sesuai kebutuhan

No.	Kebutuhan Regulasi/Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
9.	Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi	Menindaklanjuti transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
10.	Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian pelayanan publik di lingkungan KKP berdasarkan perkembangan terbaru	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
11.	Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian kebutuhan organisasi di lingkungan KKP	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
12.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan kebutuhan organisasi di lingkungan KKP	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
13.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis berdasarkan perkembangan terbaru	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
14.	Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi Unit Pelaksana Teknis	Menindaklanjuti transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional di Unit Pelaksana Teknis	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
15.	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	Tindak lanjut Permen PAN dan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Tahun 2020
16.	Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mandat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Tahun 2020

No.	Kebutuhan Regulasi/Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
17.	Peta Jabatan di Lingkungan KKP Tahun 2020-2024	Penyesuaian peta jabatan dengan kebutuhan organisasi di lingkungan KKP	Biro Hukum dan Organisasi	Unit kerja eselon I KKP	Sesuai kebutuhan
18.	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMENKP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian pedoman dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di KKP berdasarkan perkembangan terbaru	Biro Keuangan	Unit kerja eselon I KKP	Setiap tahun
19.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMENKP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan	Mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan perencanaan di bidang kelautan dan perikanan, dibutuhkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik	Pusat Data Statistik dan Informasi	Unit Kerja Eselon I KKP	Tahun 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
  
Tini Marjani

ttd.

ANTAM NOVAMBAR